



**PUTUSAN**

Nomor 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx, tempat kediaman di Cxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Pemohon bermaksud mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan keterangan dan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 865/711/X/1992, tertanggal 12 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang.

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan telah dikaruniakan 3 orang anak, yaitu :

- Hilal Rijal Muttaqin bin Eko Susetyo, umur 27 tahun
- Annisa Nurjanah binti Eko Susetyo, umur 24 tahun
- Firda Ayuningrum binti Eko Susetyo, umur 18 tahun

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama lengkap : Feb Amni Hayati Binti Bachtiar  
Chalid

Tempat /Tanggal Lahir : Malang, 25 Februari 1970

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen

Status : Janda cerai hidup

Alamat : Jl. H.Saleh No.42, xx xx xx xx

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX,

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX

4. . Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah sebagai berikut :

4.1. Istri saya, sudah satu tahun belakangan ini, berdasarkan diagnose dokter kandungan mengalami sakit miom yang menyebabkan seringkali perutnya mengalami kesakitan dan saya sebagai suami

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkadang menjadi tidak tega untuk memintanya memenuhi kewajibannya kepada saya.

4.2. Saya beserta istri dan calon istri saya, kami sudah lama tinggal berdekatan dalam satu lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan berkegiatan serta mengelola bersama Yayasan (Yayasan Bina Insan Satya Guna) untuk kemaslahatan masyarakat.

4.3. Saya dan Istri mengenal Feb Amni Hayati (calon istri) sebagai perempuan yang baik. Dan kami (saya dan istri) turut menjaga kehormatan dan martabat Yayasan serta marwah calon istri sebagai seorang perempuan tanpa suami yang seringkali kami berkegiatan bersama-sama.

4.4. Saya sebagai warga negara yang baik sangat ingin mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara demi kemaslahatan bersama, termasuk didalamnya adalah aturan untuk mengajukan ijin berpoligami melalui institusi Pengadilan Agama.

4.5. Saya berkeinginan kuat untuk berlaku adil kepada istri-istri saya kelak. Karena istri saya (Anah binti Adul) saya nikahi secara resmi melalui Kantor Urusan Agama maka saya juga bertekad kuat untuk menikahi calon istri saya (Feb Amni Hayati) juga secara resmi melalui Kantor Urusan Agama.

4.6. Sebagai calon suami, saya berkeinginan kuat untuk dapat melindungi, menjaga dan membantu calon istri (Feb Amni Hayati) yang telah bercerai dari suami sebelumnya dan mempunyai tiga orang anak yang membutuhkan pengawasan dan bimbingan.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



5. Bahwa Termohon telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Feb Amni Hayati

6. Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya.

7. Bahwa antara Pemohon dengan Feb Amni Hayati tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan

8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik.

9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan menjadi milik Pemohon dan termohon yang terdiri dari :

9.1. Tanah dan Rumah No.Sertifikat 8050, atas nama Anah

9.2. Satu Unit Mobil Merk Nissan Serena tahun 2009 No.Pol B 1480

WMV,

. atas nama Faisal Pramono

9.3 Tiga Unit Motor, Yaitu ;

- Merk Honda Vario tahun 2017 No.Pol B 6295 WRR an. Hilal Rijal Muttaqin

- Merk Honda Vario tahun 2017 No.Pol B 6804 WWL an. Annisa Nurjanah

- Merk Yamaha X-Ride tahun 2014 No.Pol B 6612 WLT an. Eko Susetyo

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Demikian juga sebaliknya Pemohon dan Termohon tidak akan mengganggu gugat harta benda calon istri kedua yang sudah ada selama ini dan menjadi milik calon istri kedua dan anak-anaknya.

Berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengharapkan keputusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri . kedua Pemohon bernama Feb Amni Hayati

Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut; Tanah dan Rumah No.Sertifikat 8050, atas nama Anah

Satu Unit Mobil Merk Nissan Serena tahun 2009 No.Pol B 1480 WMV, atas nama Faisal Pramono

Tiga Unit Motor, Yaitu ;

- Merk Honda Vario tahun 2017 No.Pol B 6295 WRR an. Hilal Rijal Muttaqin
- Merk Honda Vario tahun 2017 No.Pol B 6804 WWL an. Annisa Nurjanah
- Merk Yamaha X-Ride tahun 2014 No.Pol B 6612 WLT an. Eko Susetyo

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon  
atau

enjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 01 Desember 2020 gugatan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya

*Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Pemohon dan Termohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal ... dan Pemohon dengan Termohon belum pernah

*Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak ... mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak ... Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Pemohon berketetapan hati akan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Termohon secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan

*Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing adalah ... dan ... Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi sejak ... sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak ..., Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak ... tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak ..., Termohon pergi meninggalkan Pemohon sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

*Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جازالفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (isteri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon

*Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Pemohon dengan menetapkan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri . kedua Pemohon bernama Feb Amni Hayati

Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan

*Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Jaenudin., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H., M.H..

## Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 5826/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)